



PENETAPAN

Nomor 276/Pdt.P/2018/PA Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Moh. Irfan bin Imran, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Instalator PLN), bertempat tinggal di Desa Sibedi, RT/002, RW/001, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Julianti binti Jusman, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sibedi, RT/002, RW/001, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 276/Pdt.P/2018/PA Dgl pada tanggal 9 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.276/Pdt.P/2018/PA Dgl



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Jejaka* dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jusman dan yang menikahkan adalah Imam Mesjid yang bernama Arjun dan dihadiri saksi Nikah yang bernama Ucu dan Sunar dengan mas kawin berupa Uang Rp 110.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.276/Pdt.P/2018/PA Dgl



sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2014 di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinana Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tanpa tanggal yang maksud dari substansi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali perubahan pada pekerjaan Pemohon I adalah Instalator PLN, posita angka 2 yaitu mahar sebesar Rp 110.000,- dan pada petitum angka 3 dicabut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Nomor 7210142102890001, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim Tunggal diberi Kode P;

B. Bukti Saksi

1. **Hendriseng bin Tarore**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sibedi, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, saksi adalah Paman

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.276/Pdt.P/2018/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Oktober 2014;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka berumur 22 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan berumur 25 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Jusman dan yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam Mesjid bernama Arjun;
- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa Uang Rp 110.000,- dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Ucu dan Sunar;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilaksanakan di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

2. Iswarianti binti Sunar, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sibedi, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, saksi adalah Ibu kandung Pemohon I, saksi mengaku sebagai Kakak Pemohon II,

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.276/Pdt.P/2018/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Oktober 2014;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejak berumur 22 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan berumur 25 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Jusman dan yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam Mesjid bernama Arjun;
- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa Uang Rp 110.000,- dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Ucu dan Sunar;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilangsungkan di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonanannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.276/Pdt.P/2018/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonannya, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya guna melengkapi persyaratan mengurus akta kependudukan para pemohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti P dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat minimal pembuktian sesuai dengan Pasal 284 RBg dan bukti tersebut memiliki kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.276/Pdt.P/2018/PA Dgl



memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, pengadilan selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 15 Oktober 2014 di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Jusman yang selanjutnya memberi tauliyah kepada Imam Mesjid bernama Arjun, saksi-saksi nikahnya adalah Ucu dan Sunar dengan mahar berupa Uang Rp 110.000,- dibayar tunai dibayar tunai
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada hubungan darah,

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.276/Pdt.P/2018/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan pernikahan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Donggala karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti pernikahan dalam rangka mengurus akta kependudukan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud memenuhi persyaratan akta kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.276/Pdt.P/2018/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 15 Oktober 2014, di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kependudukan para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang pernikahan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Moh. Irfan bin Imran**) dengan Pemohon II (**Julianti binti Jusman**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014 di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Membebankan kepada Pemohon I dan II biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Jumat, tanggal 9 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1439 Hijiriyah. oleh Ruhana Faried, S.HI, M.HI., sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.276/Pdt.P/2018/PA Dgl



Hakim tunggal,

ttd

Ruhana Faried, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sitti Rabiyah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp **91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan
Pemohon I/ Pemohon II*)
Dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Donggala

Dra. Hj. Djawariah.M.Amin

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.276/Pdt.P/2018/PA Dgl



*) Coret yang tidak perlu

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.276/Pdt.P/2018/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)